



KEBEBASAN BERAGAMA, RELIGIUSITAS DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Edi Purwanto^{1*)}

Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan¹

*)Email Correspondence: edi.purwanto@upj.ac.id

Abstract: *This study employs a literature review methodology to investigate the interplay among religious freedom, religiosity, and economic development. It examines how religious freedom influences religiosity levels and economic growth, drawing on various research propositions and empirical evidence. The research relies on reputable international journal sources and keywords related to religious economy, competition, markets, and their impact on religiosity and economic development. The study reveals a significant relationship between religious freedom and religiosity, highlighting seven key propositions, including the role of state involvement in regulating religious activities, the effects of unregulated religious activities, and the impact on societal acceptance of religious symbols and rituals. It also explores the connection between religious freedom and economic development, emphasizing that it is integral to civil and political liberties, removing barriers to innovation, trade, and investment and ultimately contributing to social stability and cultural diversity. In conclusion, this study illuminates the complex connections between religious freedom, religiosity, and economic development, offering insights for policymakers to protect religious rights, encourage pluralism, and foster a diverse and inclusive society that values religious freedom and economic growth.*

Keywords: *Religious freedom, Religiosity, Economic development, Religious economy, Cultural diversity*

Abstraksi: Studi ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka untuk menyelidiki hubungan antara kebebasan beragama, religiusitas, dan perkembangan ekonomi. Studi ini mengkaji bagaimana kebebasan beragama memengaruhi tingkat religiusitas dan pertumbuhan ekonomi, dengan merujuk kepada berbagai proposisi penelitian dan bukti empiris. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber jurnal internasional yang terkemuka dan kata kunci terkait dengan ekonomi keagamaan, persaingan, pasar, dan dampaknya terhadap religiusitas dan perkembangan ekonomi. Studi ini mengungkapkan hubungan yang signifikan antara kebebasan beragama dan religiusitas, dengan menyoroti tujuh proposisi kunci, termasuk peran keterlibatan negara dalam mengatur aktivitas keagamaan, efek aktivitas keagamaan yang tidak diatur, dan dampaknya terhadap penerimaan simbol dan ritual keagamaan dalam masyarakat. Studi ini juga menjelajahi hubungan antara kebebasan beragama dan pembangunan ekonomi, dengan menekankan bahwa ini merupakan bagian integral dari kebebasan sipil dan politik, yang menghilangkan hambatan terhadap inovasi, perdagangan, dan investasi, serta pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sosial dan keanekaragaman budaya. Sebagai kesimpulan, studi ini membahas koneksi yang kompleks antara kebebasan beragama, religiusitas, dan perkembangan ekonomi, memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk melindungi hak-hak keagamaan, mendorong pluralisme, dan memupuk masyarakat yang beragam dan inklusif yang menghargai kebebasan beragama dan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Kebebasan Beragama, Religiusitas, Pembangunan Ekonomi, Ekonomi Keagamaan, Keberagaman Budaya

PENDAHULUAN

Ada anggapan bahwa agama tidak dapat dikaitkan dengan ekonomi, karena keduanya memiliki kutub yang saling bertolak belakang, yang mana agama sering diasosiasikan dengan rohani, sedangkan ekonomi diasosiasikan dengan duniawi. Meskipun mungkin ada orang yang mengasosiasikan hubungan antara agama dan ekonomi sama seperti rohani dan duniawi, namun pada kenyataannya dalam kehidupan umat beragama dan bahkan dalam kegiatan-kegiatan institusi keagamaan tidak terlepas dari aktivitas ekonomi dan dukungan ekonomi. Pembangunan rumah ibadah perlu dana, memberi santunan kepada orang-orang yang tidak beruntung dan anak-anak yatim juga perlu dana, dan tentu saja hampir semua aktivitas atau kegiatan keagamaan membutuhkan dana. Dengan demikian memisahkan aktivitas ekonomi dengan aktivitas keagamaan seperti ini tidak mungkin dapat dilakukan. Tentu saja sangat diharapkan agar umat bekerja keras untuk mendapatkan pemasukan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka dan bahkan kelimpahan jika hal tersebut dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar nilai-nilai agama, dan dengan demikian umat juga dapat mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan dari sebagian berkat atau rezeki yang diperolehnya tersebut. Yang tidak diharapkan adalah jika umat melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama dalam mencari, mengumpulkan dan melipat-gandakan kekayaan mereka. Dengan demikian keterkaitan agama dan ekonomi tentu saja tidak dapat diabaikan.

Sejumlah peneliti membuktikan bahwa kebebasan beragama memiliki pengaruh terhadap religiusitas itu sendiri, yang mana, semakin tinggi kebebasan beragama terjamin, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat pada aktivitas-aktivitas

keagamaan.¹ Kemudian banyak sosiolog atau pun ahli di bidang ekonomi dan politik dan keagamaan yang mengkaji kaitan antara kebebasan beragama dan pembangunan ekonomi. Max Weber adalah tokoh tersohor yang mengkaji kaitan antara agama dan pembangunan ekonomi, misalnya apa yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*.² Anthony Gill dalam artikelnya yang berjudul *Religious Liberty & Economic Development: Exploring the Causal Connections* mengulas secara mendalam koneksi antara kebebasan beragama dan pembangunan ekonomi.³

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka, penelitian ini mencoba menjawab: Pertama, bagaimana kebebasan beragama dapat meningkatkan religiusitas atau tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan keagamaan meningkat. Kedua, bagaimana kebebasan beragama dapat menyebabkan pembangunan ekonomi. Kemudian untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, *religious economy model* digunakan sebagai latar kajian ini.

Religious economy model (model ekonomi keagamaan) dirintis tahun 1980-an salah satunya melalui tulisan Finke dan Stark.⁴ Laurence R. Iannaccone mengatakan bahwa Adam Smith adalah orang yang meletakkan fondasi teori ekonomi untuk institusi-institusi keagamaan.⁵ Model ekonomi

¹Misalnya lihat Peter A. Zaleski and Charles E. Zech, "The Effect of Religious Market Competition on Church Giving," *Review of Social Economy* 53, no. 3 (1995): 350–67.

²Lihat Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (Londo: Routledge Classics, 2001).

³Anthony Gill, "Religious Liberty & Economic Development: Exploring the Causal Connections," *The Review of Faith & International Affairs* 11, no. 4 (2013).

⁴Roger Finke and Rodney Stark, "Religious Economies and Scared Canopies," *American Sociological Review* 53 (1988): 41–49.

⁵Laurence R. Iannaccone, "The Consequences of Religious Markets Structure:

keagamaan mengemukakan bahwa bidang keagamaan terorganisir dan berubah menurut logika pasar, yang mana absennya proteksi negara pada aktivitas keagamaan, agama-agama terorganisir menjadi pluralis dan menjadi pasar persaingan (*competitive markets*). Hasilnya agama menurun dari ranah publik ke ranah privat.⁶ Steven Pfaff dan Katie E. Corcoran menjelaskan bahwa pemikiran utama tentang teori ekonomi keagamaan adalah bahwa hubungan antar berbagai agama yang berbeda dapat dianalisis seperti halnya perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk memperebutkan konsumen pada pasar persaingan.⁷ Fenggang Yang menyebutkan paling tidak ada tiga “pasar” agama, yaitu pertama adalah “pasar bebas” yang ia sebut sebagai pluralisme yang mana semua “merek” agama diperlakukan sama oleh negara, dan setiap agama tersebut bersaing dalam persaingan bebas keagamaan tanpa intervensi negara. Kedua, negara mengizinkan lebih dari satu agama yang beroperasi secara legal, tetapi beberapa agama yang tidak diakui sebagai agama resmi oleh negara dilarang. Ini disebut sebagai pasar oligopoli. Kemudian yang ketiga, negara hanya mengizinkan satu agama negara dan ini disebut sebagai “pasar” monopoli agama.⁸ Dengan memahami perbedaan antara ketiga model ini, kita dapat memahami dinamika kompleks antara agama dan negara dalam berbagai konteks sosial

Adam Smith and the Economics of Religion,” *Rationality and Society* 3, no. 2 (1991): 156–77.

⁶Evelyn Bush, “Explaining Religious Market Failure: A Gendered Critique of the Religious Economies Model,” *Sociological Theory* 28, no. 3 (2010): 304–325., <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01376.x>.

⁷Steven Pfaff and Katie E. Corcoran, “Piety, Power, and the Purse: Religious Economies Theory and Urban Reform in the Holy Roman Empire,” *Journal for the Scientific Study of Religion* 51, no. 4 (2012): 757–76.

⁸Fenggang Yang, “Oligopoly Dynamics: Consequences of Religious Regulation,” *Social Compass* 57, no. 2 (2010): 199–200.

dan politik di seluruh dunia.

Menurut Anthony Gill, persepektif “*religious economy*” mendemonstrasikan bahwa ketika regulasi atas aktivitas keagamaan menurun, maka pluralism dan persaingan akan meningkat, dan partisipasi semua agama juga akan meningkat. Gagasan tersebut, menurut Anthony Gill, dapat dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith pada bagian pembahasan tentang “*adult education*” dalam buku monumentalnya yang berjudul *The Wealth of Nations*.⁹ Demikian juga, Roger Finke mengatakan bahwa regulasi-regulasi yang dibuat dan diberlakukan oleh negara atas agama dan aktivitas keagamaan cenderung membatasi persaingan bagi produsen keagamaan (institusi keagamaan dan para pemimpin atau tokoh agama) untuk mencari peluang dan membatasi para konsumen keagamaan (umat) untuk memilih produk keagamaan yang menurut mereka layak untuk diambil.¹⁰ Kemudian Yunfeng Lu, Byron Johnson, dan Rodney Stark menyatakan bahwa dalam pasar bebas, persaingan agama dapat mendorong para pemasok agama menjadi lebih efisien dan oleh sebab itu partisipasi keagamaan akan lebih tinggi.¹¹ Laurence R. Iannaccone pernah menguji argumen tersebut secara empiris dengan membandingkan partisipasi keagamaan di 18 negara maju, dan menemukan bahwa tingkat partisipasi kegiatan keagamaan dan kepercayaan agama secara substansial lebih tinggi di

⁹Gill, “Religious Liberty & Economic Development: Exploring the Causal Connections.”

¹⁰Roger Finke, “The Consequence of Religious Competition,” in *Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment*, ed. Lawrence Young (New York: Routledge, 1997).

¹¹Yunfeng Lu, Byron Johnson, and Rodney Stark, “Deregulation and the Religious Market in Taiwan: A Research Note,” *The Sociological Quarterly* 49, no. 1 (2008): 139–53, <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2007.00109.x>.

negara-negara yang menderegulasi aktivitas-aktivitas keagamaan (*free markets*) ketimbang di negara yang banyak mengatur, mengintervensi dan membuat regulasi-regulasi berkaitan dengan aktivitas keagamaan (*regulated markets*).¹² Dari perspektif Anthony Gill, Roger Finke, Yunfeng Lu, Byron Johnson, Rodney Stark, dan Laurence R. Iannaccone tersebut dapat diambil beberapa simpulan penting mengenai peran regulasi dalam pasar keagamaan, yaitu: (1) Regulasi yang ketat atas aktivitas keagamaan cenderung membatasi pluralisme dan persaingan antar agama. Ini dapat mempengaruhi partisipasi umat dalam agama dan kepercayaan agama mereka. Dalam pasar yang kurang diatur, agama-agama memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing dan membangun basis pengikut yang kuat. (2) Ketika pasar keagamaan lebih bebas, produsen keagamaan (institusi dan pemimpin agama) harus lebih efisien untuk menarik umat. Ini bisa mendorong inovasi dan kualitas dalam praktik agama. (3) Negara-negara yang menderegulasi aktivitas keagamaan memiliki tingkat partisipasi keagamaan yang lebih tinggi dan kepercayaan agama yang lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang berlebihan dapat membatasi perkembangan keagamaan dan pengikutnya.

Seperti telah dijelaskan di atas, model ekonomi keagamaan merumuskan bahwa aktivitas keagamaan *adalah* aktivitas ekonomi. Semakin kecil regulasi yang mengatur aktivitas keagamaan akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹³ Ketika regulasi aktivitas keagamaan menurun, pluralisme dan persaingan keagamaan meningkat, dan keseluruhan partisipasi keagamaan meningkat. Misalnya, para

pemimpin institusi keagamaan perlu digaji, operasional aktivitas keagamaan memerlukan dana, fasilitas-fasilitas rumah ibadah juga membutuhkan biaya pengadaan dan perawatan dan bangunan rumah ibadah harus dibangun dan tentunya juga membutuhkan dana. Untuk memenuhi biaya-biaya tersebut umat harus meningkatkan jumlah pendapatan agar dapat meningkatkan jumlah persembahan atau sumbangan yang diberikan kepada institusi agama mereka.¹⁴ Jika regulasi pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap agama untuk melakukan semua aktivitas keagamaan, hal tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi dari setiap umat beragama, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review*, yang didasarkan pada pendekatan riset kepustakaan. Metode ini memungkinkan penyelidikan yang komprehensif dan terstruktur terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵ Sumber-sumber kepustakaan yang digunakan sebagai basis analisis dalam penelitian ini dipilih secara cermat untuk memastikan akurasi dan relevansi.

Proses sistematisasi dimulai dengan pencarian literatur pada database penerbit-penerbit jurnal ternama yang memiliki reputasi yang baik, termasuk Taylor & Francis Group (tandfonline.com), Emerald Publishing Limited (emeraldinsight.com), John Wiley & Sons, Inc. (onlinelibrary.wiley.com), dan Sage Publications (journals.sagepub.com). Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata-kata kunci yang telah ditentukan, yaitu "*religious economy model*", "*religious competition*",

¹²Iannaccone, "The Consequences of Religious Markets Structure: Adam Smith and the Economics of Religion."

¹³Gill, "Religious Liberty & Economic Development: Exploring the Causal Connections."

¹⁴ Gill.

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

“*religious markets*”, “*religious liberty and religiosity*”, dan “*religious liberty and development economic.*”

Selanjutnya, literatur yang ditemukan diseleksi secara teliti berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik penelitian, kualitas metodologi penelitian, dan kredibilitas sumber. Data dari literatur yang relevan kemudian diekstraksi dan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan kerangka pemikiran yang dapat mendukung atau menggambarkan hubungan antara kebebasan beragama, religiusitas, dan perkembangan ekonomi.

Metode *systematic literature review* ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis dalam penelitian ini, memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti dengan merujuk pada literatur yang telah bereputasi dan terpercaya.

HASIL

Hasil penelitian menemukan beberapa temuan terkait dengan kebebasan beragama, religiusitas dan ekonomi. Temuan atau hasil penelitian tersebut dapat dituangkan sebagai berikut; temuan dari berbagai penelitian yang mengungkapkan keterkaitan antara kebebasan beragama, religiusitas, dan pembangunan ekonomi. (1) Keterkaitan antara kebebasan beragama dengan religiusitas: Studi menunjukkan bahwa kebebasan beragama dapat mempengaruhi religiusitas masyarakat. Kebebasan beragama yang lebih tinggi cenderung menghasilkan partisipasi yang lebih tinggi dalam aktivitas keagamaan. (2) Keterkaitan antara kebebasan beragama dengan pembangunan ekonomi: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, perdagangan, dan investasi. (3) Model ekonomi keagamaan: Model ekonomi keagamaan menjelaskan bahwa

aktivitas keagamaan juga merupakan aktivitas ekonomi.

PEMBAHASAN

Keterkaitan antara Kebebasan Beragama dengan Religiusitas

Pengaruh kebebasan beragama terhadap religiusitas atau tingkat keterlibatan/ partisipasi aktif masyarakat pada kegiatan-kegiatan keagamaan telah diteliti oleh sejumlah peneliti. Rodney Stark and Laurence R. Iannaccone menggunakan istilah *religious firm* untuk institusi keagamaan dan *religious economy* atau *religious markets* untuk aktivitas-aktivitas keagamaan, dan kemudian mengusulkan tujuh proposisi yang mendukung pentingnya aktivitas-aktivitas keagamaan layaknya aktivitas pasar bebas. Berikut ini adalah ringkasan dari tujuh proposisi tersebut: Pertama, mereka memproposisikan bahwa kapasitas institusi keagamaan (*religious firm*) tunggal yang memonopoli aktivitas keagamaan dalam masyarakat (*religious economy*) bergantung pada sejauh mana negara menggunakan kekuatan koersif untuk meregulasi atau mengatur aktivitas keagamaan (*religious economy*). Kedua, sejauh aktivitas keagamaan (*religious economy*) tidak diatur, maka aktivitas keagamaan dalam masyarakat akan cenderung menjadi sangat pluralistik. Artinya akan semakin banyak institusi keagamaan yang akan secara aktif terlibat dalam aktivitas keagamaan masyarakat, sehingga semakin banyak institusi keagamaan yang memiliki suatu “pangsa pasar” yang signifikan, maka akan semakin besar tingkat pluralisme. Ketiga, sejauh aktivitas keagamaan menjadi pluralistik, maka institusi-institusi keagamaan akan semakin terspesialisasi. Keempat, sejauh aktivitas keagamaan bersaing dan pluralistik, maka tingkat partisipasi semua agama akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika aktivitas keagamaan dimonopoli oleh satu atau dua institusi agama yang didukung negara, maka tingkat partisipasi keagamaan akan cenderung rendah. Kelima, sampai pada titik di

mana institusi keagamaan mencapai monopoli, maka ia akan berusaha mengerahkan pengaruhnya atas institusi-institusi agama lainnya dan dengan demikian dalam semua aspek utama kehidupan, mulai dari keluarga hingga politik, masyarakat akan dipaksa untuk menerima berbagai simbol, retorika dan ritual institusi agama yang memonopoli. Keenam, ketika deregulasi terjadi atas aktivitas keagamaan yang sebelumnya sangat banyak diatur, maka masyarakat akan terbebas dari paksaan untuk menerima berbagai simbol, retorika dan ritual institusi agama monopolis. Kemudian ketujuh, ketika negara mengurangi pemaksaan atas nama agama monopolis, dan sebaliknya justru meningkatkan pluralisme, hal tersebut akan menghasilkan aktivitas-aktivitas keagamaan yang semakin ramai bagi efektivitas dan kesuksesan institusi-institusi keagamaan yang terlibat dalam aktivitas keagamaan dalam masyarakat.¹⁶ Proposisi yang diajukan oleh Rodney Stark dan Laurence R. Iannaccone tersebut memberikan pandangan yang menarik tentang hubungan antara kebebasan beragama, religiusitas, dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas keagamaan.

Proposisi pertama menyatakan bahwa keberhasilan dan kapasitas institusi keagamaan (*religious firm*) dalam memonopoli aktivitas keagamaan bergantung pada sejauh mana negara campur tangan dalam mengatur atau mengendalikan aktivitas keagamaan (*religious economy*). Ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan negara dapat mempengaruhi kemampuan institusi keagamaan untuk mempengaruhi masyarakat.

Proposisi kedua mengemukakan bahwa ketika aktivitas keagamaan tidak diatur oleh negara, masyarakat akan

cenderung mengalami pluralisme keagamaan yang lebih besar. Ini berarti berbagai institusi keagamaan akan aktif terlibat dalam aktivitas keagamaan, menciptakan pangsa pasar yang signifikan. Pluralisme ini dapat memperkaya pengalaman keagamaan masyarakat. Proposisi ketiga mengklaim bahwa dalam situasi pluralistik, institusi keagamaan akan semakin terpisah atau terkhusus dalam bidang keagamaan tertentu. Ini mungkin karena persaingan untuk menarik anggota atau karena perbedaan keyakinan dan praktik di antara institusi-institusi tersebut.

Proposisi keempat menunjukkan bahwa dalam lingkungan keagamaan yang bersaing dan pluralistik, tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas keagamaan akan cenderung tinggi. Persaingan antara institusi-institusi keagamaan dapat mendorong orang untuk lebih aktif terlibat dalam praktik-praktik keagamaan. Proposisi kelima mengajukan gagasan bahwa ketika satu institusi keagamaan mencapai monopoli dalam masyarakat, ia akan berusaha untuk mempengaruhi institusi-institusi agama lainnya serta berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga dan politik. Hal ini dapat mengarah pada dominasi simbol, retorika, dan ritual agama yang memonopoli.

Proposisi keenam menyatakan bahwa ketika regulasi atas aktivitas keagamaan berkurang, masyarakat akan lebih bebas memilih untuk menerima atau menolak simbol, retorika, dan ritual dari institusi agama yang sebelumnya memonopoli. Ini dapat memungkinkan variasi dan pilihan dalam pengalaman keagamaan individu. Proposisi ketujuh menyiratkan bahwa ketika negara mengurangi pemaksaan terhadap monopoli agama dan justru meningkatkan pluralisme, ini akan mendorong aktivitas keagamaan yang lebih beragam dan lebih efektif bagi institusi keagamaan yang terlibat. Peningkatan pilihan keagamaan dapat memotivasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas keagamaan.

¹⁶Rodney Stark and Laurence R. Iannaccone, "A Supply-Side Reinterpretation of the 'Secularization' of Europe," *Journal for the Scientific Study of Religion* 33, no. 3 (1994): 232–35.

Implikasi dari proposisi-proposisi tersebut bagi kehidupan beragama di Indonesia dapat dipertimbangkan dengan konteks negara, budaya, dan agama yang beragam di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek implikasi yang mungkin relevan: *Pertama*, Indonesia yang merupakan negara dengan beragam agama dan budaya, penting untuk menjaga dan mendorong kebebasan beragama agar semua kelompok agama dapat berpartisipasi secara aktif dan beragam dalam kegiatan keagamaan. *Kedua*, terciptanya lingkungan yang mendukung pluralisme dalam praktik keagamaan dapat mendorong interaksi positif antara berbagai kelompok agama, memperkaya pengalaman keagamaan masyarakat, dan menghindari dominasi dari satu agama tertentu. *Ketiga*, situasi pluralistik, praktik keagamaan yang beragam akan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan dalam praktik-praktik keagamaan dan memungkinkan setiap individu untuk mengejar spiritualitas mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

Keempat, persaingan dan pluralisme dalam praktik keagamaan dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif. Dalam konteks Indonesia, di mana berbagai kelompok agama bersaing dalam lingkungan yang pluralistik, ini dapat memotivasi individu untuk lebih terlibat dalam praktik-praktik keagamaan. *Kelima*, mencegah dominasi satu agama dalam kehidupan publik sangat penting. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, menjaga keseimbangan antara agama dan kehidupan publik dapat menghindari potensi konflik dan mempromosikan harmoni. *Keenam*, perlunya memberikan kebebasan bagi individu untuk memilih pengalaman keagamaan mereka dalam lingkungan yang menghormati kebebasan beragama. Dengan demikian, individu dapat memilih praktik dan keyakinan yang sesuai dengan pandangan mereka tanpa tekanan atau pemaksaan. *Ketujuh*, pemerintah dan

masyarakat dapat mendorong pertumbuhan keagamaan yang beragam dan inklusif dengan mendukung kebebasan beragama dan pluralisme. Ini dapat menghasilkan lingkungan yang lebih kaya secara keagamaan dan menghargai perbedaan dalam keyakinan.

Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, di mana ada beragam agama dan budaya, pemahaman dan penerapan proposisi-proposisi ini dalam kebijakan dan praktik keagamaan dapat membantu membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan beragam dalam praktik-praktik keagamaan. Peter A. Zaleski dan Charles E. Zech memberikan tiga alasan mengapa kebebasan beragama akan meningkatkan religiusitas masyarakat. *Pertama*, sama seperti memiliki perbedaan selera terhadap produk-produk komersil, demikian pula mereka masing-masing juga memiliki selera yang berbeda-beda terhadap apa yang ditawarkan atau diberikan oleh institusi keagamaan. Karena agama monopolis tidak mungkin dapat memenuhi semua selera orang, maka orang-orang itu akan mulai bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan tidak lagi tertarik untuk terlibat atau berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan. Di sisi lain, jika ada kebebasan beragama di mana banyak agama yang akan terlibat dalam persaingan, akan muncul institusi-institusi keagamaan yang masuk ke dalam persaingan untuk memenuhi selera masyarakat yang berbeda-beda tersebut. Hasilnya akan lebih banyak orang yang merasakan kebutuhan agamawi mereka terpenuhi, sehingga kemudian tingkat partisipasi pada kegiatan-kegiatan keagamaan akan makin tinggi. *Kedua*, alasan mengapa Finke dan Stark mengharapkan lebih banyak keragaman agama dalam pasar persaingan (*competitive religious economy*) adalah karena kecenderungan agama-agama monopolistik menjadi malas. Namun ketika agama-agama masuk ke dalam pasar persaingan sempurna, institusi-institusi agama yang “malas” akan gagal dalam persaingan

dan ditinggalkan umat. Ketiga, agama monopoli yang didukung negara mungkin juga terhubung dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga akan ada banyak konfrontasi politik yang kemudian akan mengambil dimensi keagamaan. Namun kebebasan beragama akan membuat agama dilihat terbebas dari politik dan hasilnya akan meningkatkan tingkat partisipasi keagamaan.¹⁷ Pendapat Peter A. Zaleski dan Charles E. Zech, tersebut dapat dianalisis seperti berikut ini:

Argumentasi pertama merujuk pada perbandingan dengan pasar komersial, di mana individu memiliki beragam selera terhadap produk. Analoginya adalah bahwa individu juga memiliki preferensi dan kebutuhan spiritual yang berbeda. Dalam konteks agama monopolis, di mana satu agama mendominasi, akan sulit memenuhi seluruh spektrum kebutuhan ini. Akibatnya, masyarakat cenderung menjadi kurang tertarik dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan karena pengalaman spiritual mereka tidak sepenuhnya terpenuhi. Namun, dalam keadaan kebebasan beragama, institusi agama beragam muncul dan bersaing untuk memenuhi kebutuhan spiritual yang beragam ini. Ini menciptakan lebih banyak pilihan bagi individu, yang pada gilirannya meningkatkan potensi untuk meningkatkan religiusitas dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan.

Alasan kedua mengeksplorasi konsep pasar persaingan dalam ekonomi agama. Finke dan Stark mengamati bahwa agama-agama yang memiliki monopoli cenderung menjadi kurang aktif dan kurang inovatif karena tidak ada ancaman persaingan. Namun, ketika agama-agama beroperasi dalam lingkungan kompetitif, institusi yang kurang aktif atau malas akan gagal dalam persaingan dan ditinggalkan oleh

para penganutnya. Dengan demikian, dalam kebebasan beragama, adanya persaingan mendorong institusi-institusi agama untuk lebih aktif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan anggota mereka. Hal ini bisa berkontribusi pada meningkatnya religiusitas masyarakat.

Alasan ketiga menggambarkan kaitan antara agama yang dikuasai negara dan konflik politik. Agama yang dikuasai negara seringkali dapat terjalin erat dengan kekuatan politik. Ini dapat mengarah pada konfrontasi politik yang menggunakan dimensi keagamaan. Namun, dalam situasi kebebasan beragama, agama dapat terbebas dari campur tangan politik dan menjadi lebih fokus pada aspek spiritual. Ini dapat membuat agama lebih menarik dan relevan bagi individu, dan dalam akhirnya meningkatkan tingkat partisipasi keagamaan.

Mark Chaves dan David E. Cann menguji pengaruh kebebasan beragama terhadap religiusitas dengan membandingkan antara Irlandia dan Belgia dan menemukan tingkat kebebasan beragama yang lebih tinggi di Irlandia dibandingkan Belgia. Kebebasan beragama berpengaruh terhadap tingkat religiusitas masyarakat Irlandia lebih tinggi ketimbang masyarakat Belgia. Chaves dan Cann menjelaskan bahwa walaupun secara historis Irlandia merupakan negara Kristen, namun sejak referendum 1972 hubungan resmi antara gereja apapun dengan negara dihapuskan, sehingga hari ini ada pemisahan sempurna antara gereja dan negara. Negara tidak membuat regulasi apapun berkaitan dengan gereja atau agama, tidak ada subsidi yang diberikan negara kepada gereja atau institusi keagamaan, tidak ada pendeta atau pemimpin agama yang digaji oleh negara, dan juga tidak ada departemen atau kementerian yang mengurus masalah agama. Sementara Belgia merupakan salah satu contoh dimana gereja memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan negara. Walaupun tidak ada gereja negara di Belgia, namun

¹⁷Zaleski and Zech, "The Effect of Religious Market Competition on Church Giving."

hanya lima agama yang diakui secara konstitusional: Katolik, Protestan, Yudaisme, Anglikan dan Islam. Terdapat departemen agama di bawah Kementerian Hukum dan pembiayaan atau subsidi diberikan negara kepada institusi-institusi agama tersebut, dan banyak regulasi-regulasi yang negara terapkan untuk mengatur agama-agama resmi tersebut. Kemudian Chaves dan Cann menemukan bahwa tingkat partisipasi keagamaan di Irlandia lebih tinggi ketimbang Belgia, sebagai contoh kehadiran gereja mingguan adalah 82% di Irlandia dan 30% di Belgia.¹⁸ Analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Mark Chaves dan David E. Cann mengenai pengaruh kebebasan beragama terhadap religiusitas antara Irlandia dan Belgia menghasilkan pemahaman tentang dampak pemisahan gereja dan negara terhadap partisipasi keagamaan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin analisis yang dapat diambil dari penelitian ini:

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada korelasi antara tingkat kebebasan beragama dan tingkat religiusitas masyarakat. Dalam hal ini, Irlandia, yang memiliki pemisahan sempurna antara gereja dan negara, mengalami tingkat religiusitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Belgia yang memiliki keterikatan antara gereja dan negara. Hal ini memberikan indikasi bahwa kebebasan beragama, di mana agama tidak terikat oleh regulasi negara, dapat mendorong partisipasi keagamaan yang lebih tinggi.

Penelitian tersebut menyoroti dampak pemisahan gereja dan negara terhadap partisipasi keagamaan. Di Irlandia, di mana tidak ada regulasi negara yang mengatur atau memberikan subsidi kepada institusi keagamaan, tingkat

partisipasi keagamaan lebih tinggi. Sebaliknya, di Belgia, yang memiliki keterikatan antara agama-agama resmi dengan negara dan banyak regulasi yang mengatur agama, tingkat partisipasi keagamaan lebih rendah.

Sejarah dan budaya juga memainkan peran penting dalam penjelasan hasil ini. Walaupun Irlandia memiliki latar belakang Kristen yang kuat, pemisahan gereja dan negara pasca-referendum 1972 mungkin telah merubah dinamika partisipasi keagamaan. Di Belgia, latar belakang sejarah dan keterikatan gereja dengan negara juga mempengaruhi regulasi dan partisipasi keagamaan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa subsidi dan regulasi negara terhadap agama-agama resmi di Belgia memiliki pengaruh terhadap partisipasi keagamaan yang lebih rendah. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa subsidi dan regulasi semacam itu dapat menciptakan ketergantungan institusi keagamaan pada negara dan mengurangi inisiatif mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat secara aktif.

Penelitian tersebut memberikan dukungan empiris terhadap konsep bahwa kebebasan beragama, di mana agama tidak terikat oleh kontrol negara, dapat merangsang partisipasi keagamaan yang lebih tinggi. Ini memiliki implikasi dalam konteks kebijakan publik dan pertimbangan bagaimana regulasi agama dapat mempengaruhi dinamika keagamaan dalam suatu masyarakat.

Keterkaitan antara Kebebasan Beragama dan Pembangunan Ekonomi

Kebebasan agama bukan hanya terbukti terkait dengan tingkat religiusitas, namun sejumlah penelitian juga telah membuktikan bahwa kebebasan beragama juga terkait dengan pembangunan ekonomi. Anthony Gill dan John M. Owen IV mengatakan bahwa banyak ilmuwan atau ahli politik maupun ekonomi berpendapat bahwa ketika kebebasan sipil (*civil liberties*)

¹⁸Mark Chaves and David E. Cann, "Regulation, Pluralism, and Religious Market Structure: Explaining Religion's Vitality," *Rationality and Society* 4, no. 3 (1992): 272-90, <https://doi.org/10.1177/1043463192004003003>

digalakkan dan kebebasan politik (*political freedom*) dijamin keadaan tersebut akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun yang sering dilupakan adalah bahwa kebebasan beragama (*religious freedom*) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan sipil tersebut. Dengan demikian kebebasan beragama seharusnya juga akan berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.¹⁹ Pendapat Anthony Gill dan John M. Owen IV tersebut mengungkapkan korelasi antara kebebasan beragama, pembangunan ekonomi, kebebasan sipil, dan kebebasan politik. Berikut beberapa poin penting yang dapat diambil dari pemikiran mereka tersebut:

Pemikiran mereka menggarisbawahi bahwa kebebasan beragama tidak hanya berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka kebebasan sipil dan politik secara keseluruhan. Ini menyoroti pentingnya memahami kebebasan dalam konteks yang lebih luas, di mana kebebasan beragama berjalan seiring dengan kebebasan sipil dan politik lainnya.

Argumentasi mereka menunjukkan bahwa kebebasan sipil dan politik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menghilangkan kendala dalam berpartisipasi dan menyuarakan pendapat, masyarakat dapat lebih bebas untuk berinovasi, berdagang, dan berinvestasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran mereka menghubungkan secara eksplisit antara kebebasan beragama dengan pembangunan ekonomi. Meskipun mungkin tidak segera terlihat, kebebasan beragama dapat memberikan kontribusi

terhadap lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara yang tidak langsung. Ini bisa terjadi melalui dampak positif pada stabilitas sosial, keberagaman budaya, dan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya memengaruhi aspek ekonomi.

Pemikiran mereka mencatat bahwa banyak ahli ilmu politik dan ekonomi percaya bahwa kebebasan sipil dan politik berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemikiran mereka tersebut merangkul pandangan interdisipliner yang mencakup berbagai bidang pengetahuan. Pemikiran mereka memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan. Mengakui peran yang dimainkan oleh kebebasan beragama dalam pembangunan ekonomi dapat mendorong pemerintah untuk memastikan hak-hak agama dan kebebasan beragama dijaga dengan baik. Ini juga dapat memotivasi upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pluralisme dan keragaman agama.

Anthony Gill menemukan bahwa ketika kebebasan agama ditekankan sehingga setiap agama menjalankan aktivitas keagamaan mereka masing-masing tanpa banyak pembatasan, antara satu agama dengan agama lain diberikan kebebasan untuk hidup berdampingan dan juga bersaing untuk menciptakan daya tarik agar orang-orang tertarik untuk bergabung dengan aktivitas keagamaan mereka, terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena aktivitas agama *adalah* aktivitas ekonomi, maka kompetisi di antara agama-agama yang terlibat menghasilkan kompetisi pasar atau kompetisi untuk sama-sama meningkatkan ekonomi mereka.²⁰ Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif di Amerika Latin, Anthony Gill menemukan bahwa

¹⁹Anthony Gill and John M. Owen IV, "Religious Liberty and Economic Prosperity: Four Lessons from the Past," *Cato Journal* 37, no. 1 (2017): 115–34.

²⁰Gill, "Religious Liberty & Economic Development: Exploring the Causal Connections."

kompetisi antara Protestan dan Katolik dalam menarik pengikut berdampak pada kompetisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan para imam Katolik dan para pendeta Protestan telah mengakui bahwa kompetisi tersebut justru dapat meningkatkan aras kebebasan beragama di Amerika Latin yang justru mendorong meningkatnya aras kehadiran umat di gereja dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas keagamaan lainnya. Ketika masyarakat modern memandang status ekonomi sebagai ukuran untuk memandang status kelas sosial, maka untuk meningkatkan status kelas sosial agamanya, umat akan berusaha meningkatkan status ekonomi mereka. Itulah dasar dari model ekonomi keagamaan, yaitu: aktivitas keagamaan adalah aktivitas ekonomi.²¹

Apa yang dijelaskan Dru C. Gladney tentang hasil persaingan antara Muslim (orang Hui) dan Konfusianisme (orang Han) di Tiongkok menjelaskan model ekonomi keagamaan tersebut. Bangsa Hui adalah bangsa minoritas beragama Muslim yang mengaku bahwa mereka adalah keturunan dari perkawinan campuran antara Arab dan orang Tionghoa di Tiongkok sepanjang masa 1.200 tahun silam. Ketika pertama kali Gladney berkunjung ke sejumlah desa di Guanzhou, Propinsi Fujian pada tahun 1984, orang-orang Hui pada umumnya masih bergantung terutama pada pertanian dan akuakultur sebagai sumber kehidupan mereka. Namun ketika ia kembali berkunjung pada tahun 1994, ia menyaksikan keterlibatan orang-orang Hui dalam usaha perdagangan yang konon katanya telah mulai sejak tahun 1980-an. Perubahan-perubahan RRT ke arah bisnis swasta karena ucapan Deng Xiaoping, "Menjadi kaya adalah mulai" sepertinya telah menjadi pemicu masyarakat Tiongkok

untuk meningkatkan status sosial mereka.²²

Dru C. Gladney menemukan bahwa sebagai bangsa minoritas dan pemeluk agama minoritas di Tiongkok bangsa Hui bukan hanya dipandang rendah oleh bangsa Han karena status minoritas mereka, namun juga karena status ekonomi mereka. Kemudian kemakmuran pun datang ke Na Homestead seiring dengan keterlibatan Hui dalam usaha perdagangan. Di gerbang mesjid terkenal di Ningxia, Cina Barat Laut terdapat peringatan bagi Hui bahwa dengan kemakmuran tersebut warga desa Hui diingatkan untuk memanfaatkan kekayaan bukan untuk keuntungan pribadinya, tetapi untuk melayani masyarakat dan keyakinan agama. Perusahaan yang bersifat keagamaan (*religious enterprise*) menjadi begitu menguntungkan desa Na, sehingga bahkan sejumlah kader Partai Komunis meninggalkan partai untuk menjadi imam di mesjid.²³

Dru C. Gladney menemukan bahwa model ekonomi keagamaan terbukti dalam kasus penelitiannya. Pendapatan mesjid (*sifei*) berasal dari sedekah (*nietie*) meningkat luar biasa. Menurut laporan akuntansi milik mesjid, pada tahun 1980-an mesjid menerima sedekah dari umat hingga mencapai 20.000 yuan (US\$ 6.700) dalam setahun. Dan berdasarkan penelitian pihak luar, selama empat bulan antara tahun 1984 dan 1985, penyerahan biji-bijian, barang dan uang berjumlah 8.997,23 yuan (sekitar US\$ 3.000). Rata-rata rumah tangga Hui di Lingkungan Na menyumbang 47 yuan atau 8,40 yuan per orang ke mesjid pada tahun 1984. Jika sumbangan rata-rata tersebut dikenakan kepada seluruh warga Hui di Lingkungan Na, maka perolehan mesjid

²¹Anthony Gill, *Rendering unto Caesar: The Catholic Church and the State in Latin America* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998), 9.

²²Dru C. Gladney, "Getting Rich Is Not So Glorious: Contrasting Perspectives on Prosperity Among Muslims and Han in China," in *Market Cultures: Society and Morality in the New Asian Capitalisms*, ed. Robert. W. Hefner (Colorado: Westview Press, 1998).

²³Gladney.

pada tahun 1984 melebihi 32.500 yuan (US\$ 10.833). Uang tersebut digunakan untuk membiayai tujuh orang pengurus masjid, termasuk seorang guru agama dan empat murid, dan selebihnya untuk membiayai pengurusan dan operasional masjid sehari-hari.²⁴ Jelas sekali fenomena keagamaan Hui ini menjelaskan model ekonomi keagamaan sebagaimana dipaparkan Anthony Gill di atas bahwa aktivitas keagamaan *adalah* aktivitas ekonomi, sehingga seiring dengan dipromosikannya kebebasan beragama akan berdampak pada promosi pertumbuhan ekonomi.²⁵ Dalam penelitian Peter J. Boettke, Joshua C. Hall, dan Kathleen M. Sheehan yang menggunakan metode kuantitatif juga membuktikan bahwa kebebasan beragama berkorelasi positif dengan pembangunan ekonomi.²⁶ Alexius A. Pereira juga menemukan korelasi positif antara religiusitas dengan pembangunan ekonomi di Singapura.²⁷

Berkaitan dengan agama-agama tradisional di Cina (Budha, Taoisme and Konfucianisme), Adam Yuet Chau menguji lanskap agama-agama tradisional Cina tersebut melalui lensa ‘*modalities of doing religion*’ dan mengeksplorasi konseptualisasi yang berbeda dalam kaitannya dengan *religious market model*. Chau menggunakan istilah *ritual market* (pasar ritual) ketimbang *religious market* (pasar keagamaan) dengan menggambarkan bahwa pada aktivitas keagamaan agama tradisional Tionghoa, karena pasar ritual yang ia maksud adalah pasar dalam arti

harfiah, yang mana ada pihak yang menyediakan dan pihak yang membeli bahan-bahan upacara keagamaan yang secara harfiah dapat disebut pasar itu sendiri. Para penyedia jasa upacara keagamaan berasing untuk mendapatkan “konsumen” yang akan menggunakan jasa mereka, misalnya saja upacara penguburan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ritual *adalah* aktivitas ekonomi.²⁸ Pluralisme keagamaan di Cina dalam konteks ini bukan dalam artian agama-agama yang hidup bersama bersaing berdasarkan perbedaan agama, namun lebih pada persaingan antara para penyedia layanan ritual atau upacara keagamaan dengan program-program liturgis yang berbeda untuk menarik minat konsumen (umat) dalam menggunakan jasa layanan mereka.²⁹ Dengan demikian persaingan pasar ritual tersebut pada akhirnya berdampak pada ekonomi dalam arti harfiah.

KESIMPULAN

Dengan menggunakan metode penelitian *systematic literature review* untuk menjelajahi hubungan antara kebebasan beragama, religiusitas, dan pembangunan ekonomi. Hasil dan pembahasan mencakup temuan dari berbagai penelitian yang mengungkapkan keterkaitan antara kebebasan beragama, religiusitas, dan pembangunan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Keterkaitan antara kebebasan beragama dengan religiusitas: Studi menunjukkan bahwa kebebasan beragama dapat mempengaruhi religiusitas masyarakat. Kebebasan beragama yang lebih tinggi cenderung menghasilkan partisipasi yang lebih tinggi dalam aktivitas

²⁴ Gladney.

²⁵ Gill, “Religious Liberty & Economic Development: Exploring the Causal Connections.”

²⁶ Peter J. Boettke, Joshua C. Hall, and Kathleen M. Sheehan, “Was Adam Smith Right About Religious Competition?,” *Forum for Social Economics* 49, no. 4 (2016): 392–401, <https://doi.org/10.1080/07360932.2015.1133440>.

²⁷ Alexius A. Pereira, “Religiosity and Economic Development in Singapore,” *Journal of Contemporary Religion* 20, no. 2 (2005): 161–77.

²⁸ A. Y. Chau, “Modalities of Doing Religion and Ritual Polytypy: Evaluating the Religious Market Model from the Perspective of Chinese Religious History,” *Religion* 41, no. 4 (2011): 547–68, <https://doi.org/10.1080/0048721X.2011.624691>.

²⁹ Chau.

keagamaan. (2) Keterkaitan antara kebebasan beragama dengan pembangunan ekonomi: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, perdagangan, dan investasi. (3) Model ekonomi keagamaan: Model ekonomi keagamaan menjelaskan bahwa aktivitas keagamaan juga merupakan aktivitas ekonomi. Kompetisi antara agama-agama dalam menarik pengikut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka berikut adalah sejumlah implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks Indonesia: (1) Indonesia, sebagai negara dengan beragam agama dan budaya, perlu menjaga dan mendorong kebebasan beragama untuk memungkinkan semua kelompok agama berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas keagamaan. (2) Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa hak-hak agama dan kebebasan beragama dijaga dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. (3) Mendorong kompetisi yang sehat antara agama-agama dengan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas dalam aktivitas keagamaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman agama dan budaya, pemahaman dan penerapan temuan-temuan ini dalam kebijakan dan praktik keagamaan dapat membantu membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan beragam dalam praktik-praktik keagamaan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dan analisis yang lebih mendalam tentang konteks lokal Indonesia dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi di negara ini secara khusus.

Keterbatasan dan rekomendasi penelitian ini adalah: Pertama, penelitian

ini merupakan kajian sosial ketimbang kajian teologis, oleh sebab itu sudut pandang teologis tidak menjadi perhatian dalam kajian ini. Kedua, penelitian ini hanya mengkaji keterkaitan antara kebebasan beragama dan persaingan agama dengan religiusitas dan pembangunan ekonomi, sedangkan keterkaitan antara persaingan agama dengan isu konflik tidak menjadi perhatian dalam penelitian ini, sehingga direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkajinya lebih lanjut. Ketiga, penelitian ini merupakan riset kepustakaan dengan metode *systematic literature review* berdasarkan sumber-sumber hasil penelitian yang pernah dilakukan di luar Indonesia, sehingga untuk mengetahui cocok atau tidaknya model ekonomi keagamaan tersebut untuk Indonesia dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boettke, Peter J., Joshua C. Hall, and Kathleen M. Sheehan. "Was Adam Smith Right About Religious Competition?" *Forum for Social Economics* 49, no. 4 (2016): 392–401.
<https://doi.org/10.1080/07360932.2015.1133440>.
- Bush, Evelyn. "Explaining Religious Market Failure: A Gendered Critique of the Religious Economies Model." *Sociological Theory* 28, no. 3 (2010): 304–325.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01376.x>.
- Chau, A. Y. "Modalities of Doing Religion and Ritual Polytypy: Evaluating the Religious Market Model from the Perspective of Chinese Religious History." *Religion* 41, no. 4 (2011): 547–68.
<https://doi.org/10.1080/0048721X.2011.624691>.
- Chaves, Mark, and David E. Cann. "Regulation, Pluralism, and Religious Market Structure: Explaining Religion's Vitality."

- Rationality and Society* 4, no. 3 (1992): 272–90.
<https://doi.org/10.1177/1043463192004003003>.
- Finke, Roger. “The Consequence of Religious Competition.” In *Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment*, edited by Lawrence Young. New York: Routledge, 1997.
- Finke, Roger, and Rodney Stark. “Religious Economies and Sacred Canopies.” *American Sociological Review* 53 (1988): 41–49.
- Gill, Anthony. “Religious Liberty & Economic Development: Exploring the Causal Connections.” *The Review of Faith & International Affairs* 11, no. 4 (2013).
- . *Rendering unto Caesar: The Catholic Church and the State in Latin America*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998.
- Gill, Anthony, and John M. Owen IV. “Religious Liberty and Economic Prosperity: Four Lessons from the Past.” *Cato Journal* 37, no. 1 (2017): 115–34.
- Gladney, Dru C. “Getting Rich Is Not So Glorious: Contrasting Perspectives on Prosperity Among Muslims and Han in China.” In *Market Cultures: Society and Morality in the New Asian Capitalisms*, edited by Robert W. Hefner. Colorado: Westview Press, 1998.
- Iannaccone, Laurence R. “The Consequences of Religious Markets Structure: Adam Smith and the Economics of Religion.” *Rationality and Society* 3, no. 2 (1991): 156–77.
- Lu, Yunfeng, Byron Johnson, and Rodney Stark. “Deregulation and the Religious Market in Taiwan: A Research Note.” *The Sociological Quarterly* 49, no. 1 (2008): 139–53.
<https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2007.00109.x>.
- Pereira, Alexius A. “Religiosity and Economic Development in Singapore.” *Journal of Contemporary Religion* 20, no. 2 (2005): 161–77.
- Pfaff, Steven, and Katie E. Corcoran. “Piety, Power, and the Purse: Religious Economies Theory and Urban Reform in the Holy Roman Empire.” *Journal for the Scientific Study of Religion* 51, no. 4 (2012): 757–76.
- Stark, Rodney, and Laurence R. Iannaccone. “A Supply-Side Reinterpretation of the ‘Secularization’ of Europe.” *Journal for the Scientific Study of Religion* 33, no. 3 (1994): 232–35.
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Routledge Classics, 2001.
- Yang, Fenggang. “Oligopoly Dynamics: Consequences of Religious Regulation.” *Social Compass* 57, no. 2 (2010): 199–200.
- Zaleski, Peter A., and Charles E. Zech. “The Effect of Religious Market Competition on Church Giving.” *Review of Social Economy* 53, no. 3 (1995): 350–67.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.